



**BUPATI KUNINGAN**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI KUNINGAN**  
**NOMOR: 2 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN  
KELURAHAN DI KABUPATEN KUNINGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUNINGAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, Kemajuan, Kemandirian Keberlanjutan Pembangunan, Kesejahteraan masyarakat serta daya saing Desa dan Kelurahan di Kabupaten Kuningan perlu adanya pedoman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Pedoman pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1099);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019; (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1448 Tahun 2018);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 Tahun 2018);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2019; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 9 Seri E);
21. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 20);
22. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan; (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 51);



23. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan; (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 11);
24. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2019; (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 58).
25. Peraturan Bupati Kuningan Nomor .... Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa; (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor .....);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah Bagian dari Wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah sebagai Perangkat Kecamatan;
7. Kepala Desa adalah Pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan sepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
11. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu system kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun;
13. Rencana Kerja pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun;
14. Evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya Penilaian Tingkat Penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan yang didasarkan pada Instrumen Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan guna mengetahui epektifitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan Kelurahan;
15. Instrumen perkembangan Desa dan kelurahan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai serta menentukan status tertentu dari capaian hasil tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayah dan Kemasyarakatan;
16. Evaluasi Diri adalah Upaya untuk melakukan Penilaian terhadap Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang secara Internal dilakukan oleh Kepala Desa dan Kelapa Kelurahan;
17. Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil dari Desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kewilayahan dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan;
18. Tim Evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan yang selanjutnya disingkat Tim EPDesKel adalah kelompok Kerja yang melaksanakan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan berdasarkan Instrumen pada wilayah kerja yang telah ditentukan;
19. Lomba Desa dan kelurahan adalah Evaluasi dan penilaian Perkembangan Penyelenggaraan pemerintahan, kewilayah dan kemasyarakatan yang cepat berkembang;
20. *Labsite* adalah sebuah desa kelurahan yang dapat dijadikan percontohan bagi desa dan kelurahan lainnya;

21. Pekan Inovasi perkembangan Desa dan Kelurahan yang selanjutnya disebut PINDesKel adalah penyelenggaraan kegiatan untuk mempublikasikan berbagai keberhasilan dan Inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan;
22. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
24. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
26. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
27. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
28. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
29. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
30. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN  
Pasal 2

- (1) Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dimaksudkan untuk:
  - a. menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektifitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
  - b. mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, dalam daya saing Desa dan Kelurahan.

- (2) Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan bertujuan untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan Perkembangan Desa dan Kelurahan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember.

### Pasal 3

Sasaran pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan meliputi:

- a. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten; dan
- b. Pemerintah Desa dan Kelurahan.

## BAB III PEMANTAUAN DAN PENILAIAN

### Pasal 4

- (1) Pemantauan tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan meliputi:
  - a. Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
  - b. Perlombaan Desa dan Kelurahan;
  - c. Pekan Inovasi perkembangan Desa dan Kelurahan;
  - d. Menentukan lokasi *labsite* untuk Perkembangan Desa dan Kelurahan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berkala ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, serta Desa dan Kelurahan;
- (3) Penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan dilakukan dengan membandingkan data tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan data Profil Desa dan Kelurahan sesuai dengan indikator penilaian;
- (4) Penilaian tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan dilakukan dengan tahapan:
  - a. Evaluasi diri di tingkat Desa dan Kelurahan;
  - b. Penilaian di tingkat Kecamatan;
  - c. Analisis Validasi, Peninjauan, Klarifikasi dan Pemingkatan di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan.
- (5) Penilaian tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan klasifikasi data di Desa dan Kelurahan calon juara yang meliputi:
  - a. Menetapkan Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
  - b. Melakukan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
  - c. Memfasilitasi PINDesKel;
  - d. Memberikan penghargaan Upakarya Wanua Nugraha; dan
  - e. Menentukan lokasi *Labsite*.



BAB IV  
EVALUASI

Pasal 5

- (1) Evaluasi Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui aspek:
  - a. Pemerintahan;
  - b. Kinerja;
  - c. Inisiatif dan Kreativitas dalam Pemberdayaan masyarakat;
  - d. Desa dan Kelurahan berbasis Teknologi Informasi/ E-Goverenment; dan
  - e. Pelestarian adat dan budaya.
- (2) Evaluasi Bidang Kewilayahan Desa dan Kelurahan meliputi aspek:
  - a. Identitas;
  - b. Batas;
  - c. Inovasi;
  - d. Tanggap dan siaga bencana; dan
  - e. Pengaturan Investasi.
- (3) Evaluasi Bidang Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan meliputi aspek:
  - a. Partisipasi masyarakat;
  - b. Lembaga kemasyarakatan;
  - c. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
  - d. Keamanan dan ketertiban;
  - e. Pendidikan;
  - f. Kesehatan;
  - g. Ekonomi;
  - h. Penanggulangan kemiskinan; dan
  - i. Peningkatan kapasitas masyarakat.

BAB V  
INSTRUMEN EVALUASI DAN INDIKATOR PENILAIAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, ditetapkan instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
- (2) Instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Instrumen Pemantauan; dan
  - b. Instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan.
- (3) Instrumen pemantauan serta Instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.

Pasal 7

Indikator dan skor penilaian evaluasi perkembangan desa dan kelurahan terpadu tercantum dalam huruf A dan B Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Juara pertama evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan adalah Desa dan Kelurahan yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan indikator penilaian pada Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan.
- (2) Juara pertama evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten adalah Desa dan Kelurahan yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan indikator penilaian pada Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten.

#### Pasal 9

Juara pertama evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menjadi peserta dalam pertemuan para Juara Pertama evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Jawa Barat.

### BAB VI

#### TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

##### Pasal 10

- (1) Tim penilai Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan anggotanya terdiri dari Unsur Perangkat Kecamatan dan Tim Penggerak PKK Kecamatan.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

##### Pasal 11

- (1) Tim penilai Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten anggotanya terdiri dari Unsur Perangkat Daerah Kabupaten dan Tim Penggerak PKK Kabupaten.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian terhadap Juara pertama Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan untuk menentukan juara Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten.

### BAB VII

#### SEKRETARIAT TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

##### Pasal 12

- (1) Sekretariat tim penilai Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Sekretariat tim penilai Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan bertempat di kantor Kecamatan setempat.

BAB VIII  
PENETAPAN JUARA PENILAIAN EVALUASI PERKEMBANGAN  
DESA DAN KELURAHAN

Pasal 13

- (1) Juara Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Juara Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX  
PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Penghargaan juara Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan diberikan oleh Camat.
- (2) Juara Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten diberikan penghargaan oleh Bupati.

Pasal 15

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan dalam bentuk piagam atau bentuk lainnya sesuai dengan kemampuan Daerah.

BAB X  
PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan dilaporkan oleh Camat Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan adalah selaku penanggungjawab pada pelaksanaannya.

BAB XI  
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan yang berkaitan pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang bersifat operasional dan belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.



Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
Pada tanggal 15 Januari 2019



Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 16 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019 NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 2 TAHUN 2019

TANGGAL : 15 Januari 2019

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI PERKEMBANGAN  
DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN KUNINGAN

**A. INSTRUMEN PEMANTAUAN**

- I. PROVINSI : .....
- II. KABUPATEN : .....
- III. DESA : .....

A) DATA DASAR

- 1. Jumlah Penduduk :
- 2. Luas Wilayah :
- 3. Kode Desa :

B) PEMERINTAHAN

- 1. Apakah telah merealisasikan anggaran Bantuan Keuangan?
  - a. Ya
  - b. Tidak

Jika Ya, berapa jumlah totalnya?  
Rp.....atauRp.....

- 2. Apakah Desa dan Kelurahan pernah melakukan BinteK/Sosialisasi/Pelatihan terkait Pemerintahan Desa dan Kelurahan?
  - a. Ya
  - b. Tidak

Jika Ya, berapa kali dalam setahun

- 3. Apakah di Desa dan Kelurahan terdapat program prioritas/unggulan yang diberikan?
  - a. Ya
  - b. Tidak

Jika Ya, program apa?  
.....  
.....

- 4. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan sudah memiliki peraturan Bupati/Walikota mengenai Desa dan Kelurahan?
  - a. Ya
  - b. Tidak

Jika Ya, Peraturan tentang apa? Sebutkan  
.....

5. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan memberikan penugasan kepada perangkatnya?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, penugasan tentang apa? Sebutkan

.....

6. Apakah ada data Profil Desa?

- a. Ada
- b. Tidak

Jika ada, lampirkan data/hard copy/softcopy .....

Jika tidak ada, apa alasannya .....

7. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan melakukan pendampingan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan oleh Perangkatnya?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, pendampingan tentang apa? Sebutkan

.....

8. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan melakukan/terlibat pembinaan secara berkala terhadap masyarakat dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, pembinaan tentang apa? Sebutkan

.....

9. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan melakukan pengawasan secara berkala dalam hal penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, pengawasan dilakukan kapan, dan dilakukan oleh siapa? Sebutkan .....

10. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan pernah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota atau Badan/Lembaga Internasional?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, penghargaan tentang apa? Sebutkan

.....

11. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam tahun ini pernah memberikan penghargaan khusus untuk masyarakat?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, penghargaan tentang apa? Sebutkan

.....



12. Berapa jumlah perangkat desa termasuk Kepala Desa dalam Unit saudara? (lampirkan data/hard copy/softcopy)

13. Apakah ada Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD)?

- a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
- b. Jika tidak ada, alasannya.....

14. Berapa rata-rata besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing desa?

15. Apakah Alokasi Dana Desa (ADD) sudah sesuai dengan UU No.6/2014 (paling sedikit 10% dari dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus),  
Jika tidak sesuai, alasannya.....

16. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan sudah melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD)?

- a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
- b. Jika tidak ada, alasannya.....

17. Apakah ada Perbup atau peraturan kepala daerah tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Desa (DD)?

- a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
- b. Jika tidak ada, alasannya.....

18. Sebutkan penggunaannya Dana Desa (DD)?

19. Berapa persen Dana Desa (DD) yang sudah disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota? (lampirkan data/hard copy/softcopy)

20. Penyaluran Dana Desa (DD) sudah pada tahap keberapa?

21. Sudah berapa Desa yang memiliki Peraturan Desa tentang APBDesa?  
(lampirkan data/hard copy/softcopy)

22. Bagaimana mekanisme pemeriksaan dan pengawasan Pemerintah Desa dan Kelurahan terhadap pelaksanaan APBDesa dan dana lainnya, untuk mencegah penyimpangan

23. Apakah Musrenbang Tingkat Desa dan Kelurahan sudah dilaksanakan sesuai jadwal?

a. Pada bulan...

b. Bila tidak sesuai jadwal, kendalanya.....

24. Apakah Musrenbang Tingkat Desa dan Kelurahan sudah mengakomodir aspirasi masyarakat desa?

25. Bagaimana penggunaan dana stimulan?

26. Apakah sudah memiliki RPJMDesa?

a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)

b. Jika tidak ada, alasannya.....

27. Apakah sudah memiliki RKPDes?

a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)

b. Jika tidak ada,

28. Apakah sudah memiliki Perdes tentang APBDesa?  
a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)  
b. Jika tidak ada, alasannya.....

29. Apakah ada data Profil Desa?  
a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)  
b. Jika tidak ada, alasannya.....

30. Berdasarkan data ini desa saudara termasuk desa apa? (Swasembada, Swakarya, Swadaya).

31. Apa tipologi desa saudara ? (pertanian, nelayan dsb)

32. Apakah ada data Monografi Desa ?  
a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)  
b. Jika tidak ada, alasannya.....

33. Apakah Dana Desa (DD) sudah diterima?  
a. Sudah tahap ke berapa?

- b. Berapabesarannya?

34. Bagaimana penggunaan dana stimulan?



35. Apakah desa saudara sudah memiliki batas wilayah berdasarkan titik koordinat?

36. Apakah dalam penetapan dan penegasan batas desa melalui tahapan yang sudah ditentukan?

a. Bila ya, tahapannya apa saja....

b. Bila tidak, alasannya.....

### C) KEWILAYAHAN

1. Apakah ada data Monografi Desa?

a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)

b. Jika tidak ada, alasannya.....

2. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan pernah melakukan fasilitasi mengenai batas Desa dan Kelurahan yang terletak diantara Kecamatan?

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, dimana?

3. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai peta pengembangan wilayah Desa dan Kelurahan?

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, peta pengembangan wilayah tentang apa?

4. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai peta rawan bencana?

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, lampirkan.

5. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai program pelestarian lingkungan yang ada di Desa dan Kelurahan?
- a. Ya
  - b. Tidak

Jika Ya, dimana?

6. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai program pembangunan kawasan Perdesaan dan Kelurahan?
- a. Ya
  - b. Tidak

Jika Ya, program apa? Sebutkan

7. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan pernah mengadakan kegiatan yang bersifat untuk kepentingan konservasi?
- a. Ya
  - b. Tidak

Jika Ya, kegiatan apa? Sebutkan

8. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai daerah sabuk hijau/green belt di wilayahnya?
- a. Ya
  - b. Tidak

Jika Ya, Sebutkan

9. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai ma: yang jelas mengenai zona pengembangan ekonomi Perdesaan dan Kelurahan?
- a. Ya
  - b. Tidak

Jika Ya, Sebutkan

10. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai kebijakan terkait pengembangan usaha ekonomi rakyat (usaha ekonomi mikro) yang ada di Perdesaan dan Kelurahan?
- a. Ya
  - b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk aturan apa? Sebutkan

11. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai program pengembangan wisata Desa dan Kelurahan?
- a. Ya
  - b. Tidak

Jika Ya, Sebutkan

D) KEMASYARAKATAN

1. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai kebijakan mengenai peningkatan ketentraman dan ketertiban di daerah Perdesaan dan Kelurahan?
- Ya
  - Tidak

Jika Ya, Sebutkan .....

2. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan memberikan bantuan atau kerjasama dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban?
- Ya
  - Tidak

Jika Ya, bantuan apa? Sebutkan

.....

3. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan melakukan pemberdayaan masyarakat?
- Ya
  - Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

.....

4. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai program keberpihakan terhadap masyarakat kurang mampu?
- Ya
  - Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

.....

5. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai program yang melibatkan peran serta masyarakat?
- Ya
  - Tidak

Jika Ya, program apa? Sebutkan

.....

6. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan secara berkala melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan?
- Ya
  - Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

.....

7. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan memiliki kebijakan untuk mendorong Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)?
- Ya
  - Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

.....



8. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan memiliki kebijakan untuk mendorong pengembangan PKK?  
a. Ya  
b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa?Sebutkan

.....

9. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan memiliki kebijakan untuk mendorong pelaksanaan budaya gotong royong?  
a. Ya  
b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

.....

10. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan memberikan bantuan untuk Perpustakaan Desa dan Kelurahan?  
a. Ya  
b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

.....

#### E. RESPONDEN DI DESA

Nama : .....

Jabatan : .....

NIP. : .....

TTd : .....

## **B. INSTRUMEN PENGUNGKAP DATA DAN NILAI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN**

Petunjuk:

1. Instrumen Pengungkap Data dan Nilai Perkembangan Desa dan Kelurahan ini merupakan instrumen yang cukup objektif untuk melihat dan menilai perkembangan Desa dan Kelurahan.
2. Isilah Instrumen Evaluasi ini dengan kejujuran karena akan berdampak ada keabsahan tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan. Dengan demikian maka pembinaan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap Desa dan Kelurahan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Bagi Desa dan Kelurahan itu sendiri dapat mengevaluasi diri dan melakukan upaya segera untuk meningkatkan perkembangan Desa dan Kelurahanannya masing-masing.
3. Lingkarilah poin/angka (Kolom 4 dan Kolom 5) yang besumber dari Bidang, Aspek, Indikator, dan Subindikator secara benar dan tepat pada kondisi dua tahun terakhir.
4. Kondisi/jumlah tahun ke-I (kolom 4) dan tahun ke-II (kolom 5) harus diisi lengkap. Apabila salah satu data tidak diisi lengkap maka data cukup sulit diolah. Sebagai konsekuensinya, Desa dan Kelurahan yang bersangkutan cukup sulit diketahui tingkat perkembangannya.
5. Untuk mengisi instrumen ini secara akurat diperlukan sumber data yang komprehensif dan terdokumentasikan serta informan yang andal.

A) BIDANG PEMERINTAHAN

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
HANYA DIISI OLEH KELURAHAN					
1.	Sarana Prasarana	<p>a. Gedung kantor ADA, DI RUMAH PRIBADI ADA, SEWA ADA, MILIK PEMDA, SEMIPERMANEN ADA, MILIK PEMDA, PERMANEN</p> <p>b. Gedung Pertemuan TIDAK ADA A, MILIK PEMDA, SEMIPERMANEN ADA, MILIK PEMDA, PERMANEN</p> <p>c. Perangkat Kelurahan 50% BUKAN PNS DI ATAS 50% PNS</p> <p>d. Mesin tik/ komputer TIDAK ADA ADA</p> <p>e. Kendaraan dinas lurah TIDAK ADA ADA</p> <p>f. Struktur Organisasi TIDAK ADA ADA</p> <p>g. Jaringan Listrik</p>	<p>1 1</p> <p>2 2</p> <p>3 3</p> <p>1 1</p> <p>2 2</p> <p>1 1</p> <p>2 2</p> <p>1 1</p> <p>2 2</p> <p>1 1</p> <p>2 2</p>	<p>1 1</p> <p>2 2</p> <p>3 3</p> <p>1 1</p> <p>2 2</p> <p>1 1</p> <p>2 2</p> <p>1 1</p> <p>2 2</p>	Sebutkan Sumber





NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET	
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)		
1	2	3	4	5	6	
			TIDAK ADA	1		1
			ADA	2		2
			e. Buku Registrasi Pelayanan	1		1
			TIDAK ADA	2		2
			ADA			
			f. Buku Profil Kelurahan	1		1
			TIDAK ADA	4		4
			ADA			
			g. Buku Administrasi Umum	1		1
			TIDAK ADA	2		2
ADA						
h. Buku Administrasi Kependudukan	1	1				
TIDAK ADA	2	2				
ADA						
i. Buku Administrasi Keuangan	1	1				
TIDAK ADA	2	2				
ADA						
j. Buku Administrasi Pembangunan	1	1				
TIDAK ADA	2	2				
ADA						
k. Buku Administrasi Lainnya	1	1				
TIDAK ADA	2	2				
ADA						
l. Kartu Uraian Tugas	1	1				
TIDAK ADA	2	2				
ADA						

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		m. Peta Wilayah Kelurahan TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	
		n. Peta Batas Kelurahan TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	
<b>II. KINERJA</b>					
1.	Kinerja	a. Strategi dalam pemberdayaan masyarakat - Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat (P3MD) (Khusus diisi oleh Desa) TIDAK ADA ADA - Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat 2 tahun terakhir TIDAK ADA ADA - Fasilitasi dalam pemasaran produk unggulan dari masyarakat TIDAK ADA ADA b. Kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat Ada tidaknya regulasi dalam pemberdayaan masyarakat TIDAK ADA ADA	1 2  1 2  1 2	1 2  1 2  1 2	Lampirkan dokumennya          Lampirkan dokumennya
			1 2	1 2	



NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		<p>c. Pembinaan Kemasyarakatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- melakukan forum-forum kebersamaan seperti gotong royong 2 tahun terakhir TIDAK ADA ADA</li> <li>- <i>Reward</i> bagi perangkat dan kelompok masyarakat TIDAK ADA ADA</li> </ul>	1 2	1 2	
		<p>d. Budaya Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- apakah telah mendata kehadiran pegawai secara rutin TIDAK YA</li> <li>- apakah telah memiliki standar jam pelayanan TIDAK YA</li> <li>- apakah sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan masyarakat BELUM ADA ADA</li> </ul>	1 2 1 2	1 2 1 2	
III. INISIATIF DAN KREATIVITAS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
1.	Inisiatif kreatifitas dan	a. Visi dan misi pemberdayaan masyarakat TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Lampirkan dokumennya

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat: TIDAK ADA</li> <li>c. Eksistensi institusi pemberdayaan masyarakat dan aparaturnya TIDAK ADA</li> <li>d. Alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat dan aparaturnya TIDAK ADA</li> <li>e. Kebijakan pemerintah desa dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan (khusus diisi oleh desa) TIDAK ADA</li> <li>f. Alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan (khusus diisi oleh desa) TIDAK ADA</li> </ul>	<p>1</p> <p>2</p>	<p>1</p> <p>2</p>	
<b>IV. DESA DAN KELURAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI/E-GOVERNMENT</b>					
1.	Ketersediaan sistem teknologi informasi berbasis internet	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jaringan Internet TIDAK ADA</li> <li>b. Website Desa</li> </ul>	<p>1</p> <p>2</p>	<p>1</p> <p>2</p>	

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
2.	Perangkat komputer	<p>a. <i>Software</i> Dengan Spesifikasi Minimal Untuk Operasi Jaringan Internet TIDAK ADA ADA</p> <p>b. <i>Hardware</i> Dengan Spesifikasi Minimal Untuk Operasi Jaringan Internet TIDAK ADA ADA</p>	1 2	1 2	
4.	Administrasi	<p>a. Administrasi Berbasis Teknologi Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Administrasi umum TIDAK ADA ADA</li> <li>- Administrasi kependudukan TIDAK ADA ADA</li> <li>- Administrasi keuangan TIDAK ADA ADA</li> <li>- Administrasi BPD (Khusus diisi oleh Desa) TIDAK ADA ADA</li> <li>- Administrasi pembangunan TIDAK ADA ADA</li> </ul>	1 2 1 2 1 2 1 2	1 2 1 2 1 2 1 2	



NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		- Administrasi lainnya TIDAK ADA ADA	2	2	
		b. Perangkat yang mengelola Teknologi Informasi TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Tersedia tokoh pemuda teknopreneur di tingkat RT/RW TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Perpustakaan <i>online</i> TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Internet gratis/ <i>HotSpot</i> TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
<b>V. PELESTARIAN ADAT DAN BUDAYA</b>					
1.	Pelestarian Adat dan Budaya	a. Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Adat dan Budaya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Keterlibatan Kelembagaan Adat dalam Pelestarian Adat dan Budaya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Pembinaan Seni Budaya Serempak TIDAK ADA	1	1	Oleh sebutkan Siapa,



NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET		
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)			
1		3	4	5	6		
			2	2			
			ADA				
			d. Kebijakan Menjaga kelestarian adat TIDAK ADA	1 2		1 2	Oleh Siapa, sebutkan
			e. Alokasi Anggaran Pelestarian Adat TIDAK ADA	1 2		1 2	Oleh Siapa, sebutkan

B) BIDANG KEWILAYAHAN

NO.	IDENTITAS/KONDISI	KETERANGAN
1	2	3
I. IDENTITAS DESA DAN KELURAHAN		
1.	Nama	:
2.	Kode	:
3.	Tipologi (LINGKARI YANG SESUAI)	:
4.	Orbitasi Wilayah ke Kabupaten/Kota (LINGKARI YANG SESUAI)	:
5.	Kondisi Wilayah	:
II. BATAS		
1.	Batas Desa	:
2.	Penetapan batas dengan Ordinat	:
3.	Komposisi Umur	:
4.	Leb, h dari 15 Tahun	:
	Leb, h dari 15 tahun sampai dengan 56 tahun	:
	Leb, h dari 56 tahun	:
Jumlah penduduk menurut gender (BANYAK ORANG)		
Jumlah penduduk total		
Jumlah penduduk laki-laki		
Jumlah penduduk perempuan		
Jumlah kepala keluarga		

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
III. INOVASI					
1.	Embrio Aktivitas Inovasi	<p>a. Adanya produk unggulan. TIDAK ADA</p> <p>b. Adanya Peran pemerintah dalam mengelola produk unggulan. TIDAK ADA</p> <p>c. Adanya keuntungan finansial untuk dari aktivitas ekonomi produktif. TIDAK ADA</p> <p>d. Adanya keuntungan sosial dari aktivitas ekonomi produktif. TIDAK ADA</p> <p>e. Adanya kegiatan kreatif yang membutuhkan teknologi. TIDAK ADA</p>	<p>1 2</p> <p>1 2</p> <p>1 2</p> <p>1 2</p> <p>1 2</p>	<p>1 2</p> <p>1 2</p> <p>1 2</p> <p>1 2</p> <p>1 2</p>	
2.	Kelembagaan Inovasi	<p>a. Adanya pelebmbagaan aktivitas inovasi masyarakat (mis. UMKM, koperasi, cluster). TIDAK ADA</p> <p>b. Adanya peta rencana (roadmap inovasi) secara berkelanjutan dalam mengembangkan produk</p>	<p>1 2</p>	<p>1 2</p>	

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		unggulan desa TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
3.	Jejaring Inovasi	<p>a. Interkoneksi yang terbangun dalam pengelolaan produk inovasi masyarakat (mis. adanya divisi kerjasama dalam manajemen UMKM/BUMDes). TIDAK ADA ADA</p> <p>b. Kesepahaman dan kerjasama dengan pemerintahan sekitar dalam pengelolaan potensi khususnya produk unggulan. TIDAK ADA ADA</p> <p>c. Dukungan pemerintahan supra (mis. kecamatan, kabupaten, provinsi, atau pusat) bagi pengembangan produk unggulan. TIDAK ADA ADA</p> <p>d. Jaringan pengembangan (mis. dukungan dunia pendidikan dan keterampilan) untuk peningkatan kualitas produk unggulan. TIDAK ADA ADA</p> <p>e. Jejaring Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemasaran produk inovasi. TIDAK ADA ADA</p>	1 2  1 2  1 2  1 2	1 2  1 2  1 2  1 2	
			1	1	



NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		ADA	2	2	
4.	Budaya Masyarakat	Inovasi			Lampirkan semua bukti
		a. Teknologi tepat guna yang ditemukan masyarakat 2 tahun terakhir. TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	
		b. Pemanfaatan teknologi tepat guna. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Lembaga penyedia teknologi. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Aktivitas masyarakat dalam pengembangan produk. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Upaya pelestarian pengembangan produk. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
5.	Keterpaduan Perencanaan Inovasi				
		a. Adanya integrasi antara peta rencana ( <i>roadmap</i> ) inovasi dengan perencanaan pembangunan tahunan dan lima tahunan (Mis. Rencana Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah). TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Adanya sinergi pengembangan inovasi dengan kerangka Sistem Inovasi Daerah (SIDa). TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
6.	Kepekaan Masyarakat terhadap Dinamika Global/Ekonomi	a. Penemuan inovasi yang ramah lingkungan	1	1	Lampirkan Bukti Lengkap
		TIDAK ADA	2	2	
		b. Kemampuan penyesuaian produk inovasi terhadap dinamika tuntutan konsumen/pasar	1	1	
		TIDAK ADA	2	2	
c. Adanya rencana pengembangan produk inovasi di dalam maupun di luar desa dan kelurahan	1	1			
TIDAK ADA	2	2			
d. Adanya sinergi berbagai lembaga dalam pembangunan inovatif ( <i>Heksagonal</i> )	1	1			
TIDAK ADA	2	2			
7.	Faktor-faktor Kunci dalam Pengelolaan Potensi secara Inovatif	a. Spesialisasi Produk Unggulan	1	1	Sebutkan Produk Unggulannya dan bagai/unsur yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan potensi
		TIDAK ADA	2	2	
		b. Dukungan Penelitian dan Pengembangan	1	1	
		TIDAK ADA	2	2	
c. Pengembangan Sumber Daya Manusia ataupun dari Supranya	1	1			
TIDAK ADA	2	2			
d. Ketersediaan dan Akses Bahan Baku dari dalam desa dan kelurahan	1	1			
TIDAK ADA	2	2			

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		<p>e. Ketersediaan Sumberdaya Modal dari pemerintah Desa dan Kelurahan atau pihak ke tiga TIDAK ADA ADA</p> <p>f. Pelatihan Kewirausahaan TIDAK ADA ADA</p> <p>g. Adanya Kepemimpinan dan Visi Bersama dalam mengembangkan dan mengelola potensi Desa dan Kelurahan TIDAK ADA ADA</p>	<p>1 2</p> <p>1 2</p> <p>1 2</p>	<p>1 2</p> <p>1 2</p> <p>1 2</p>	
IV. TANGGAP DAN SIAGA BENCANA					
1.	Perencanaan Kontingensi	Adanya musyawarah perencanaan identifikasi bencana TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
2.	Peta Risiko bencana	<p>a. Ketersediaan peta bencana beserta rambu-rambunya TIDAK ADA ADA</p> <p>b. Sosialisasi mengenai peta bencana pada masyarakat dalam waktu 2 tahun terakhir ini TIDAK ADA ADA</p>	<p>1 2</p> <p>1 2</p>	<p>1 2</p> <p>1 2</p>	



NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ....)	TAHUN KE-2 (THN ....)	
1	2	3	4	5	6
3.	Sistem Peringatan Dini Terpusat Masyarakat	<p>a. Pengetahuan dan simulasi dalam menghadapi Risiko 2 tahun terakhir TIDAK ADA</p> <p>b. Sistem Pemantauan yang dikembangkan pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menghadapi bencana TIDAK ADA</p> <p>c. Layanan TTM penanganan bencana yang di bentuk Desa dan Kelurahan TIDAK ADA</p> <p>d. Penyebarluasan dan Komunikasi tanggap bencana TIDAK ADA</p> <p>e. Alat deteksi dini bencana TIDAK ADA</p>	<p>1 2</p> <p>1 2</p> <p>1 2</p> <p>1 2</p> <p>1 2</p>	<p>1 2</p> <p>1 2</p> <p>1 2</p> <p>1 2</p> <p>1 2</p>	
4.	Infrastruktur Evakuasi	<p>a. Tempat Evakuasi TIDAK ADA</p> <p>b. Jalur Evakuasi TIDAK ADA</p> <p>c. Sarana Evakuasi TIDAK ADA</p>	<p>1 2</p> <p>1 2</p> <p>1 2</p>	<p>1 2</p> <p>1 2</p> <p>1 2</p>	



NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ....)	TAHUN KE-2 (THN ....)	
1	2	3	4	5	6
V. PENGATURAN INVESTASI					
1.	Investasi yang masuk ke Desa dan Kelurahan	<p>a. Investasi yang masuk ke Desa dan Kelurahan dalam 2 tahun terakhir TIDAK ADA</p> <p>b. Apakah melibatkan BPD dan Pemerintah Desa dan Kelurahan TIDAK YA</p> <p>c. Menyebabkan terjadinya pembebanan pada Desa dan Kelurahan TIDAK ADA</p> <p>d. Menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian TIDAK ADA</p> <p>e. Mengurangi jumlah kepemilikan Tanah Desa/Tanah Kas Desa (Khusus Diisi Oleh Desa) TIDAK ADA</p>	<p>1 2</p> <p>1 2</p> <p>4 1</p> <p>4 1</p> <p>4 1</p>	<p>1 2</p> <p>1 2</p> <p>4 1</p> <p>4 1</p> <p>4 1</p>	

C) BIDANG KEMASYARAKATAN

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
<b>I. PARTISIPASI MASYARAKAT</b>					
1.	Musyawarah Dusun	a. Partisipasi Masyarakat	1	1	
		TIDAK ADA	5	5	
		b. Rasio Laki-Laki Dan Perempuan	1	1	
		TIDAK SEIMBANG	3	3	
2.	Swadaya Masyarakat Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa 2 Tahun Terakhir	Partisipasi Pendanaan Masyarakat	1	1	
		TIDAK ADA	2	2	
3.	Swakelola Masyarakat Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa 2 Tahun Terakhir	Partisipasi Masyarakat	1	1	
		TIDAK ADA	2	2	
4.	Gotong Royong Penduduk Desa 2 Tahun Terakhir	Aktifitas Gotong Royong Penduduk	1	1	
		TIDAK ADA	4	4	
<b>II. LEMBAGA KEMASYARAKATAN</b>					
1.	Organisasi Pemuda	Aktifitas Organisasi Pemuda	1	1	
		TIDAK ADA	2	2	
2.	Organisasi Profesi (petani, nelayan, buruh, paguyuban, dll)	Aktifitas Organisasi Profesi	1	1	
		TIDAK ADA	2	2	
3.	Organisasi Olah Raga	Aktifitas Organisasi Olah Raga	1	1	
		TIDAK ADA	1	1	

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		ADA	2	2	
4.	LPM atau Sebutan Lain	Aktifitas LPM TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
5.	Kelompok Royong	Aktifitas Kelompok Gotong Royong TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
6.	Karang Taruna	Aktifitas Karang Taruna TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
7.	Lembaga Adat, Budaya, Dan Kesenian	Aktifitas Lembaga Adat, Budaya, Dan Kesenian TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
8.	Kelompok Usaha	Aktifitas Kelompok Usaha TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
9.	Koperasi	Memiliki Koperasi TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	
10.	Organisasi Perempuan	Aktifitas Organisasi Perempuan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
III. PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)					
1.	Lembaga PKK	Keberadaan PKK TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	
2.	Program PKK	Realisasi 10 Program Pokok TEREALISASI 1 KEGIATAN TEREALISASI di atas 1 KEGIATAN	1 2	1 2	

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
3.	Organisasi PKK	Kelengkapan Kelompok Kerja TIDAK LENGKAP LENGKAP Kelengkapan Kelompok Dasawisma TIDAK LENGKAP LENGKAP	1 2	1 2	
<b>IV. KEAMANAN DAN KETERTIBAN</b>					
1.	Pengamanan Lingkungan Manusia	<p>a. Kerja sama pelestarian lingkungan TIDAK ADA ADA</p> <p>b. Kerja sama pemantauan limbah perusahaan yang ada di desa TIDAK ADA ADA</p> <p>c. Kerja sama pendaur ulangan limbah TIDAK ADA ADA</p> <p>d. Petugas keamanan lingkungan (Linmas) TIDAK ADA ADA</p> <p>e. Pos kamling (Keamanan Lingkungan) TIDAK ADA ADA</p>	1 2	1 2	
2.	Konflik SARA	<p>a. Konflik antar kelompok TIDAK ADA ADA</p> <p>b. Konflik antar suku TIDAK ADA ADA</p>	4 4	4 4	



NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
3.	Perkelahian	c. Konflik berbau agama/kepercayaan TIDAK ADA	4	4	
		d. Konflik antar RAS TIDAK ADA	1	1	
		Kasus perkelahian yang menimbulkan korban dalam 2 tahun terakhir TIDAK ADA	4	4	
		ADA	1	1	
4.	Pencurian perampokan dan	a. Kasus pencurian/perampokan biasa TIDAK ADA	2	2	
		ADA	1	1	
5.	Perjudian	b. Kasus pencurian/perampokan dengan kekerasan TIDAK ADA	2	2	
		ADA	1	1	
6.	Narkoba	Jumlah kasus perjudian dengan berbagai modus TIDAK ADA	2	2	
		ADA	1	1	
7.	Prostitusi	a. Jumlah kasus narkoba dengan pelaku pemerintah desa TIDAK ADA	4	4	
		ADA	1	1	
8.	Pembunuhan	b. Anggota Masyarakat yang Terkena Narkoba TIDAK ADA	4	4	
		ADA	1	1	
7.	Prostitusi	Jumlah kasus prostitusi dengan berbagai modus TIDAK ADA	4	4	
		ADA	1	1	
8.	Pembunuhan	a. Jumlah kasus pembunuhan	4	4	
		ADA	1	1	

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		b. Jumlah kasus pembunuhan yang korbananya penduduk desa setempat TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		c. Jumlah kasus pembunuhan yang pelakunya penduduk desa setempat TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
9.	Kekerasan Seksual	Jumlah kasus perkosaan TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
10.	Kekerasan Keluarga	dalam			
		a. Kekerasan terhadap anak TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		b. Kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
11.	Penculikan	Jumlah kasus penculikan TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
12.	HIV/AIDS	Kasus HIV/AIDS TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
V. PENDIDIKAN					
1.	Buta Huruf	Penduduk yang tidak bisa baca tulis TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
2.	Putus Sekolah	a. Jumlah Penduduk Tidak Tamat SD/ sederajat KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1% b. Jumlah Penduduk Tidak Tamat SLTP/ sederajat KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1%	4 1	4 1	
3.	Tamat Sekolah	a. Jumlah penduduk tamat SLTA/ sederajat KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1% b. Jumlah penduduk tamat D3/Sarjana muda KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1% c. Jumlah penduduk tamat Sarjana/S-1 KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1% d. Jumlah penduduk tamat Pasca Sarjana KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1%	1 4 1 4 1 4 1 4	1 4 1 4 1 4 1 4	
<b>VI. KESEHATAN</b>					
1.	Kematian Bayi	Jumlah Kematian Bayi PENURUNAN KURANG DARI 10% DARI TAHUN SEBELUMNYA PENURUNAN DI ATAS 10% DARI TAHUN SEBELUMNYA	1 4	1 4	
2.	Gizi dan Kematian Balita	a. Jumlah Balita Gizi Buruk ENURUNAN KURANG DARI 10% DARI TAHUN SEBELUMNYA PENURUNAN LEBIH DARI 10% DARI TAHUN SEBELUMNYA	1 2	1 2	

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		b. Jumlah Balita Meninggal KURANG DARI 1% DI ATAS 1%	2	2	
		a. Keberadaan Posyandu TIDAK ADA ADA	1	1	
		b. Kelembagaan PRATAMA DI ATAS PRATAMA	1	1	
		a. Jumlah RT Pengguna Sumber Air Lainnya TIDAK ADA ADA	1	1	
		a. Total RT Mempunyai Jamban /WC sendiri	1	2	
		MENURUN	1	1	
		METAP	2	2	
		MENINGKAT	3	3	
		b. Total RT yang tidak memiliki jamban /WC sendiri	3	3	
		MENURUN	3	3	
		METAP	2	2	
		MENINGKAT	1	1	
		c. Total RT pengguna MCK umum	1	1	
		MENURUN	1	1	
		METAP	2	2	
		MENINGKAT	3	3	
		d. Total RT pengguna MCK di sungai /kali	3	3	
		MENURUN	3	3	
		TETAP	2	2	
		MENINGKAT	1	1	
		e. Total RT yang tidak mendapat air bersih	3	3	
		MENURUN	3	3	
5.	Kepermilikan Jamban Dalam Rumah Tangga (RT)				



NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		TETAP MENINGKAT	2 1	2 1	
6.	Fasilitas Kesehatan Lingkungan	a. Puskesmas/Balai Pengobatan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Bidan/Mantri/Dokter TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Jamban Keluarga/MCK TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
VII. EKONOMI					
1.	Pengangguran	Jumlah penduduk usia 15-65 tahun yang tidak bekerja KURANG DARI 10% LEBIH DARI ATAU SAMA DENGAN 10%	4 1	4 1	
2.	Mata Pencabarian/Sumber Pendapatan ( <i>Checklist</i> mayoritas penduduk yang mana dan lingkari khusus yang Pendapatan Perkapita)	Pertanian Industri Jasa			
3.	Kelembagaan Ekonomi	a. Pasar Tradisional TIDAK ADA ADA b. Toko/Kios TIDAK ADA ADA	1 2 1 2	1 2 1 2	

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		c. Pangkalan Ojek, Becak, Delman, Dan Sejenisnya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
VIII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN					
1.	Data Masyarakat Miskin	Data Masyarakat Miskin TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
2.	Program Penanggulangan Kemiskinan	Program Penanggulangan Kemiskinan TIDAK ADA ADA	1 3	1 3	
IX. PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT					
1.	Analisis Kebutuhan	a. Penyusunan Analisis Kebutuhan Masyarakat TIDAK ADA ADA b. Banyaknya Kegiatan Kapasitas Masyarakat 1-3 LEBIH DARI 3	1 2	1 2	
2.	Pelaksanaan Program	Jumlah Jenis program Peningkatan Kapasitas Masyarakat 1-3 Lebih dari 3	1 2	1 2	

## CARA PENENTUAN TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

Menghitung poin total dari subindikator masing-masing desa dan kelurahan kemudian rujuk pada nilai ideal yang ditentukan pada kolom 3 kategori di bawah.

Mengklasifikasikan poin Desa ke dalam kategori sebagai berikut:

NO	POIN	KATEGORI
1	2	3
1	≤ 300	Kurang Berkembang
2	301 – 450	Berkembang
3	> 451	Cepat Berkembang

Mengklasifikasikan poin Kelurahan ke dalam kategori sebagai berikut:

NO	POIN	KATEGORI
1	2	3
1	≤ 200	Kurang Berkembang
2	201 – 350	Berkembang
3	> 351	Cepat Berkembang

## **C. FORMAT LAPORAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN**

- I. PENDAHULUAN
  - A. Latar Belakang Evaluasi
  - B. Tujuan
  - C. Manfaat
- II. PELAKSANAAN KEGIATAN
  - A. Jadwal Kegiatan
  - B. Nama-Nama Tim EPDesKel Pengumpulan Data
  - C. Sumber-sumber Data yang Digunakan
- III. HASIL EVALUASI
  - A. Kondisi Desa dan Kelurahan Berdasarkan Bidang, Aspek, Indikator, dan Subindikator
  - B. Hasil Evaluasi/Poin
- IV. POTENSI DAN PENGEMBANGAN KEUNGGULAN LOKAL
  - A. Produk Unggulan Lokal
  - B. Adat istiadat Spesifik
  - C. Inisiatif dan Kreatifitas Desa dan Kelurahan
  - D. Kesenian dan Budaya Khas Desa dan Kelurahan
- V. PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA
  - A. Permasalahan yang Timbul pada Saat Pengumpulan dan Pengolahan Data
  - B. Permasalahan yang dihadapi terkait Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa dan Kelurahan
  - C. Upaya Pemecahan Masalah
- VI. SIMPULAN DAN SARAN
  - A. Simpulan
  - B. Saran
- VII. LAMPIRAN-LAMPIRAN

